





Daftar Isi

Pelajari dengan baik petunjukpetunjuk dalam Buku Panduan ini. Pastikan kamu memahaminya.



Pengantar

Pengantar Penerbitan	2
Sambutan Ketua	3
Aliansi Kebangsaan	

Tiga Ranah Pancasila

Memahami Konsepsi Tiga	
Ranah Pancasila	6
Pancasila sebagai	
Paradigma Pembangunan	10

Tentang Program

Deskripsi Program	12
Kriteria dan Persyaratan	13
Tata Cara Pendaftatan	14
Alur Pendaftaran	15
Timeline Program	16
Tim Program	18

Lampiran

Surat Kesanggupan	
Penelitian	18
Surat Pertanggungjawaban	18
Surat Rekomendasi	18

Penutup

Kata Penutup	19
Podcast Tiga Ranah Pancasila	20

Halaman 1

Dana Darma Pancasila

KATA PENGANTAR

Buku Panduan ini disusun sebagai bahan rujukan bagi pihak-pihak yang memiliki minat pada program bantuan dana penelitian dari Yayasan Dana Darma Pancasila. Buku ini memuat penjelasan singkat tentang Program serta konsep Tiga Ranah Pancasila sebagai sebuah kerangka paradigmatik akademik dalam memahami problematika bangsa.

Tujuan diterbitkannya buku panduan ini untuk memudahkan calon penerima bantuan melakukan penyesuaian topik kajian penelitian tugas akhirnya baik Tesis maupun Disertasi. Kemudian, buku ini juga memuat kriteria dan persyaratan calon pelamar, tata cara pendaftaran serta jadwal terkait program Dana Darma Pancasila.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberi panduan sekaligus mengundang pihak-pihak yang berminat untuk mengajukan proposal penelitian sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta kerjasamanya demi terselenggaranya Program Dana Darma Pancasila ini.

Jakarta, Juli 2025

YUDI LATIF

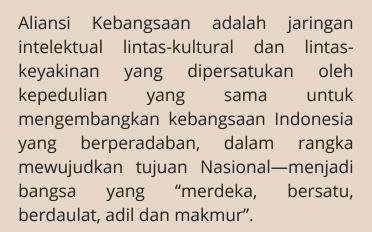
Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila

Kata Sambutan Ketua Dewan Pembina

Pontjo Sutowo



Mengarusutamakan Pancasila melalui Inisiatif 'Dana Darma Pancasila'



Kami percaya bahwa tak ada kebangkitan dan kemajuan tanpa diusahakan secara sengaja dan penuh kesadaran. Lewat pengalaman sejarah perjuangan bangsa, kita bisa melihat bahwa usaha menumbuhkan kesadaran itu memerlukan "fajar budi" (keutamaan budi), yang dapat menyatukan pikiran, perasaan dan kemauan dalam spirit kolektif.

Dalam kaitan itu, peran intelektual sangat menentukan dan selalu menjadi pemantik gerakan kemajuan, kebangkitan dan kemerdekaan Indonesia.

Pengamalan masa lalu bisa menjadi lilin kecil untuk menyinari perjalanan bangsa ke depan. Memang benar, tak ada seorang pun yang bisa mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Akan tetapi, memprediksi kemungkinan yang terjadi di masa depan lebih baik daripada tidak mempersiapkan sama sekali. Untuk itu, pengetahuan tentang masa lalu dapat membantu memahami masa depan. Tanpa pelajaran dari masa lalu, perjalanan ke depan ibarat memasuki lorong sunyi kegelapan.

Berangkat dari kehendak untuk turut mengarusutamakan epistemologi Pancasila sebagai paradigma Pembangunan Nasional, Aliansi Kebangsaan mencoba mengambil bagian dengan meluncurkan inisiatif "Dana Darma Pancasila".

Dalam mengarungi perjalanan bangsa ke depan, perjuangan mewujudkan politik harapan harus berjejak pada visi yang diperjuangkan menjadi kenyataan. Harapan tanpa visi bisa mengarah pada kesesatan. Visi tersebut harus mempertimbangkan warisan terbaik masa lalu, peluang masa kini, serta keampuhannya untuk mengantisipasi masa depan.

Visi transformatif yang diharapkan itu demi keampuhannya perlu meletakkan pembangunan dalam kerangka kerja perkembangan peradaban. Bahwa pembangunan nasional itu pada hakekatnya gerak merupakan berkelanjutan dalam peningkatan mutu peradaban bangsa. Ketahanan nasional sebagai daya sintas suatu bangsa pada dasarnya ditentukan oleh daya (kualitas) budaya dan peradaban yang tercermin dari kondisi-kondisi yang berlangsung pada tiga ranah utama peradaban: ranah mental-kultural (tata nilai), ranah institusional-politikal (tata kelola), dan ranah material-teknologikal (tata sejahtera).

Dalam konteks Indonesia, visi Pancasila mengantisipasi pentingnya memperhatikan ketiga ranah tersebut. Ranah mental-kultural (tata nilai) basis utamanya adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Ranah institusional-politikal kelola) basis utamanya Ranah material-tenologikal keempat. (tata sejahtera) basis utamanya sila kelima. Ketiga ranah tersebut bisa dibedakan, namun tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila memiliki kapasitas untuk menjadi acuan paradigma pembangunan nasional.

Segala idealitas wawasan Pancasila itu bisa memperoleh kepenuhan artinya bila mampu diwujudkan dalam realitas kehidupan kenegaraan kebangsaan. Untuk itu, Pancasila filosofi sebagai dasar negara (Philosophische Grondslag) menghendaki dimensi pemenuhan tiga filsafat (ontologi, epistemologi, dan aksiologi) yang bertaut dengan tiga dimensi ideologi (keyakinan, pengetahuan, dan tindakan).

1

"Pancasila seyogianya tak berhenti sebatas keyakinan-ontologis, melainkan harus diturunkan menjadi paradigma epistemologis sebagai jembatan bagi perwujudan tindakan aksiologis." Dalam kaitan itu, Pancasila seyogianya tak berhenti sebatas keyakinan-ontologis, melainkan harus diturunkan menjadi paradigma epistemologis sebagai jembatan bagi perwujudan tindakan aksiologis. Perwujudan Pancasila sebagai paradigma epistemik Pembangunan Nasional pada gilirannya memelukan prasyarat kecerdasan, pemahaman dan pengkajian yang mendalam.

Proses objektivikasi Pancasila memerlukan berbagai kerangka teori pengetahuan sebagai turunan dari epistemologi Pancasila. Dan untuk memperkaya khasanah pengetahuan teoritik itu bisa dilakukan dengan melakukan kerja penelitian secara berkesinambungan, yang memadukan antara riset lapangan dan riset literatur komparatif—dengan menelaah berbagai karya ilmiah dari sumber mana pun dan disiplin ilmu apa pun yang senafas dan dapat memperkuat epistemologi Pancasila.

Berangkat dari kehendak untuk turut mengarusutamakan epistemologi Pancasila sebagai paradigma Pembangunan Nasional, Aliansi Kebangsaan mencoba mengambil bagian dengan meluncurkan inisiatif "Dana Darma Pancasila". Inisiatif ini dimaksudkan untuk memberi bantuan dana penelitan dan kerja ilmiah dalam isu-isu yang terkait dengan Tiga Ranah Pancasila (tata nilai, tata kelola, tata sejahtera). Saat ini, Aliansi Kebangsaan fokus memberikan kepada mahasiswa pasca-sarjana (S2 dan S3) yang akan melakakun penelitan untuk menulis tesis dan disertasi.



Semoga rintisan inisiatif ini bisa merangsang berbagai pihak untuk ikut terlibat --sebagai pengguna maupun pemberi bantuan dana, atau pun bentukbentuk partisipasi lainnya, sebagai ikhtiar untuk mengarusutamakan Pancasila dalam Pembangunan Nasional. Sebuah katalis yang diperlukan sebagai jembatan objektivikasi Pancasila dalam mewujudkan perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Jakarta, September 2025

Ketua Dewan Pembina Yayasan Dana Darma Pancasila Pontjo Sutowo

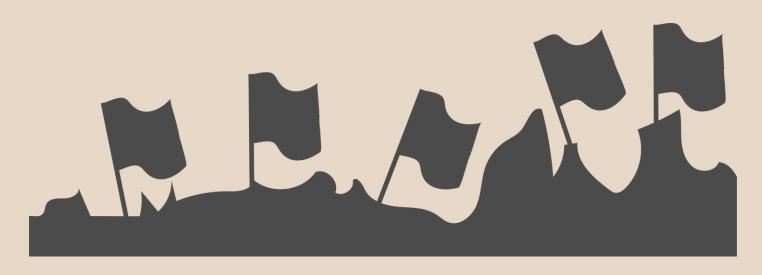
Memahami

Konsep Tiga Ranah

Pancasila

Pembangunan nasional adalah gerak berkelanjutan dari peningkatan mutu budaya dan peradaban dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional berlandaskan (kerangka keyakinan, pengetahuan dan tindakan) Pancasila. Laju pembangunan dalam kerangka transformasi peradaban itu sekarang menghadapi tantangan yang serius dari penderasan arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang membawa serta perubahan-perubahan tata nilai, tata kelola, dan tatanan material dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Sementara itu, respon yang diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut terkendala oleh kesibukan kontestasi politik jangka pendek, yang cenderung mengabaikan persoalan pembangunan fundamental yang berjangka panjang.





Untuk itu, harus ada kekuatan alternatif untuk mengingatkan dan menunjukan peta jalan pembangunan yang lebih dapat diandalkan. Jalan pembangunan yang lebih menjamin ketahanan nasional dengan kesanggupan untuk merealisasikan visi dan misi negara sebagaimana tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945.

Dalam kaitan itu, perlu diingatkan bahwa Pembangunan Nasional hakikat sesungguhnya merupakan gerak berkelanjutan dalam peningkatan mutu peradaban bangsa. Ketahanan nasional sebagai daya sintas suatu bangsa pada dasarnya ditentukan oleh daya (kualitas) budaya dan peradaban yang tercermin dari kondisi-kondisi yang berlangsung pada tiga ranah utama kehidupan sosial: mental-kultural. ranah ranah institusional-politikal, dan ranah materialteknologikal. Ranah pertama disebut sebagai ranah budaya, sedang ranah kedua dan ketiga disebut sebagai ranah peradaban. Meski demikian, lazim pula dipahami, bahwa dalam istilah peradaban pun terkandung basis nilai budaya. Oleh karena itu, ketiga ranah tersebut bisa disebut dalam satu tarikan nafas sebagai ranah peradaban.

Penjelasan tentang ranah mental-kultural bisa meminjam argumentasi dari Arnold Toynbee dan (1947) dan Oswald Spengler (1991). Dalam bukunya, A Study of History, Toynbee melakukan pelacakan faktor kebangkitan terhadap dan kejatuhan sekitar dua puluhan peradaban, dengan kesimpulan yang mengaitkan disintegrasi peradaban dengan proses melemahnya visi spiritual tersebut. Hal peradaban senada dikemukakan oleh Spengler. Dalam bukunya, The Decline of the West, ia kemunduran menengarai peradaban Barat disebabkan oleh pudarnya "jiwa" budaya (spirit, etos, etika, mindset) yang menjadi elan vital peradaban.

Penjelasan tentang ranah institusionalpolitikal antara lain dikemukakan oleh
Daren Acemoglu dan James A. Robinson.
Dalam karya bersamanya, Why Nations
Fail: The Origins of Power, Prosperity and
Poverty (2012), keduanya menengarai
bahwa sebab pokok kegagalan suatu
negara-bangsa bukan karena kurang
adidaya atau sumberdaya, melainkan
karena salah urus, alias salah desain
kelembagaan dan tata-kelola
pemerintahan.

Penjelasan tentang ranah materialteknologikal diajukan oleh banyak pemikir. Bahwa ide dan peradaban dari suatu kelompok yang dominan dalam penguasaan (sumberdaya) material dan teknologi akan kuat mempengaruhi ide dan peradaban kelompok lain. Menurut Toynbee, semakin tinggi teknologi sebuah peradaban, makin mudah meradiasi lapisan-lapisan budaya pada peradaban lain. Lebih dari itu, para pemikir lintas zaman dan lintas mazhab, meski dengan perspektif yang berbedamenunjukkan kesamaan kepedulian terhadap pentingnya memperhatikan keadilan material. Para pemikir utilitarian seperti Jeremy Bentham menekankan pentingnya kesejahteraan umum (the greatest happiness of the greatest number) sebagai basis ketahanan dan kebajikan sosial.

PANCASILA DAN TIGA RANAH PEMBANGUNAN NASIONAL

Dalam konteks Indonesia, visi Pancasila telah mengantisipasi pentingnya memperhatikan ketiga ranah tersebut. Ranah mental-kultural (tata nilai) basis utamanya adalah sila pertama, kedua, dan ketiga. Ranah institusional-politikal (tata kelola) basis utamanya sila keempat. Ranah material-tenologikal (tata sejahtera) basis utamanya sila kelima. Dalam kerangka Pancasila, ketiga ranah tersebut bisa dibedakan, namun tak bisa dipisahkan.

Berlandaskan nilai-nilai Pancasila, orientasi dari ketiga ranah kehidupan sosial tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan mental-kultural diarahkan untuk menjadikan bangsa berkepribadian (berkarakter) dengan nilai utamanya berlandaskan sila pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa kehendak untuk bersatu dan harmoni dalam perbedaan bisa diraih manakala mampu mengembangkan hubungan welas asih dengan "Yang Mahasuci". yang memancarkan semangat ketuhanan yang berkebudayaan, lapang dan toleran; welas asih dengan sesama manusia, memancarkan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab; welas asih dalam hubungan manusia dengan ruang hidup (tanah air) dan hidupnya (kebangsaan), pergaulan memancarkan semangat yang persatuan dalam keragaman bangsa. Dengan spirit Ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan, dikembangkan dayadaya spiritualitas dalam sosiabilitas berperikemanusiaan, yang egaliter, mandiri, amanah (berintegritas), beretos kerja yang positif dan kreatif, sanggup menjalin serta persatuan (gotong-royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan).

- 2. Pengembangan institusi sosial-politik diarahkan untuk menjadi bangsa yang nilai utamanya berdaulat dengan berlandaskan sila keempat. Bahwa tatanan sosial-politik hendak dibangun mekanisme melalui demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmatkebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan); termanifestasi yang dalam kehadiran pemerintahan negara yang melindungi segenep bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kesejahteraan memajukan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemedekaan, perdamajan dan keadilan.
 - 1. Pengembangan ranah materialteknologikal dirahkan untuk menjadi mandiri bangsa yang berkesejahteraan umum dengan nilai utamanya berladaskan sila kelima. kemandirian Bahwa dan kesejahteraan umum hendak diraih dengan mengupayakan perekonomian merdeka; berlandaskan usaha tolong-menolong disertai (semangat koperatif), negara atas "karunia pengusaan kekayaan bersama" (commonwealth) serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas karunia terberikan dengan input yang pengetahuan dan teknologi.

Pada akhirnya, ketiga ranah tersebut, secara sendiri-sendiri dan secara simultan diarahkan untuk mewujudkan visi negarabangsa: terwujudnya perikehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual), berlandaskan Pancasila.

TIGA AGEN TRANFORMASI SOSIAL

Pengembangan ketiga ranah tersebut memerlukan keandalan tiga agen sosial: rejim pendidikan dan pengetahuan, rejim politik-kebijakan, rejim ekonomi-produksi. Dalam konteks persoalan Indonesia hari, ketiga rejim mengemban prioritas tugas sebagai berikut.

Prioritas rejim pendidikan dan pengetahuan adalah membenahi aspek mental-spiritual dengan merevitalisasi pendidikan budi pekerti, terutama pada pendidikan dasar. Budi tingkat mengandung arti "pikiran, perasaan dan kemauan"; pekerti artinya "tenaga". Alhasil, pendidikan budi-pekerti mengupayakan bersatunya pikiran, perasaan dan tekadmanusia kemauan yang mendorong kekuatan tenaga yang dapat malahirkan penciptaan dan perbuatan yang baik, benar dan indah. Dengan pendidikan budipekerti diharapkan mampu melahirkan generasi baru Indonesia yang berkarakter dan kreatif dengan jiwa merdeka.

Prioritas rejim politik-kebijakan adalah ulang sistem demokrasi dan menata pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Untuk itu. berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus ditinjau ulang. Praktik politik tidak dibiarkan sekadar perjuangan kuasa demi kuasa, namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara. Kebijakan politik harus merespons tantangan perbaikan tata kelola budaya (mental-kultural), tata kelola sumberdaya material dan teknologi, serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan tata kelola demokrasi dan pemerintahan, berbagai elemen krusial harus mendapat perhatian yang serius. Beberapa diantaranya menyangkut penataan sistem hukum dan pemulihan kewibawaan otoritas hukum (nomokrasi) kesehatan dapat menopang yang demokrasi, persoalan institusi pemilihan yang padat modal, penataan ulang otonomi daerah, urgensi kehadiran pedoman direktif (haluan pembangunan) yang lebih solid, persoalan tumpang-tindih kewenangan insitusi-institusi negara, terlalu luasnya kelembagaan cakupan negara karena kehadirian beragam komisi negara serta pentingnya perampingan birokrasi negara untuk menghindari jebakan negara pegawai, urgensi pembenahan sistem perwakilan yang lebih inklusif dan representatif dengan kesanggupan mengakomodasi segala kekuatan sosial-politik, serta pentingnya memperbaiki rejim negara kesejahteraan yang bersemangat gotong-royong.

Prioritas rejim ekonomi-produksi adalah mengembangkan semangat tolong-(kooperatif) dalam menolong perekonomian. Politik anggaran harus lebih berorientasi pada kesejahteraan Kemampuan negara untuk menguasai dan mengelola kekayaaan bersama (commonweath) cabang-cabang serta produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus disehatkan. Mata rantai produksi dari hulu ke hilir sampai terkonsentrasi jangan di satu tangan. Kemakmuran dan pemerataan ekonomi bisa didorong melalui pengembangan kewirausahaan yang dibekali penguasaan teknologi, dengan memprioritaskan pengembangan teknologi dan karakterististik berbasis potensi (kondisi) keindonesiaan. Untuk itu. pengembangan teknologi harus beringsut dari lembaga riset negara menuju ranah industri-perusahaan; terintegrasi ke dalam sektor produktif.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Dengan demikian, Pembangunan Nasional menurut visi Pancasila adalah fungsi dari pembangunan mental-kultural ditambah fungsi institusional-politikal serta fungsi material-teknologikal (pembangunan nasional = pembanguan mental-spiritual + institusional-politikal + material-teknologikal).

Pancasila bisa dijadikan tolok ukur paradigmatik untuk mengembangkan dan menguji sistem Pembangunan dan ketahanan nasional Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila sebagai gatra ideologi tidak ditempatkan sejajar dengan gatra politik, ekononomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, melainkan berdiri di atas (mengatasi) gatra-gatra lainnya.

Taraf pembangunan dan ketahanan Nasional di berbagai gatra tersebut bisa diukur berdasarkan imperatif Pancasila ranah dalam mental-kultural, institusional-politikal, serta materialteknologikal. Dengan demikian, setiap gatra bisa dilihat kondisi ketahanan mental-kulturalnya, kondisi institusional-pitikalnya, kondisi serta material-teknologinya.

Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan ideologi kerja yang dapat memberikan framework (panduan dan haluan) yang memudahkan perumusan prioritas pembangunan, pencanangan program kerja, serta pilihan kebijakan dalam kerangka memperkuat ketahanan nasional dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Dalam implementasinya, pembudayaan Pancasila sebagai paradigma Pembangunan Nasional itu sepatutnya dikembangkan secara horizontal dengan melibatkan segenap komponen kebangsaan. Selain pemerintah, kaum intelektual, pemuka agama, seniman, masyarakat media, masyarakat sipil, pemangku adat dan lain-lain bisa melakukan pengisian dan pengembangan Pancasila sesuai terhadap dengan kapasitas dan posisinya masing-masing.

Dalam pendekatan ini, nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur bagi segala untuk komponen bangsa menakar apakah kebijakan-kebijakan negara dan praktik kehidupan kebangsaan sesuai atau tidak dengan imperatif-imperatif Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bisa menjadi alat kritik sekaligus panduan bagi kebijakan negara serta perilaku aparatur negara dan warga negara.

Dengan cara-cara seperti itulah, idealitas Pancasila bisa bergerak mendekati realitas. Tes terakhir dari keampuhan Pancasila teruji ketika setiap sila dan konsepsinya bisa dibumikan dalam kenyataan semesta Pembangunan.



I. DESKRIPSI PROGRAM

Dana Darma Pancasila

(Bidang Penelitian)

Pengertian

Program Dana Darma Pancasila bidang penelitian merupakan program bantuan dana yang diberikan oleh Yayasan Dana Darma Pancasila sebagai bentuk dukungan kepada kalangan intelektual dalam pengembangan kajian yang terkait dengan Tiga Ranah Pancasila (tata nilai, tata kelola, tata sejahtera).

Tujuan dan Manfaat Dana Darma Pancasila

- Menumbuhkan para pemikir untuk memperadabkan bangsa.
- Memberikan dukungan kepada para intelektual untuk mengembangkan kajian yang berfokus pada pemikiran Pancasila.
- Mendorong tumbuhnya perkembangan kajian tentang Pancasila di tiga ranah, yaitu ranah Tata Nilai, Tata Kelola, dan Tata Sejahtera.

II. KRITERIA DAN PERSYARATAN Bantuan Dana Penelitian

Program bantuan ini diberikan untuk mahasiswa S2 dan S3 yang sedang menjalani tugas akhir (Tesis/Disertasi) dengan tema penelitian yang berkaitan dengan Tiga Ranah Pancasila, baik yang mencakup ranah yaitu Ranah Tata Nilai, Ranah Tata Kelola, dan Ranah Sejahtera.

Kriteria:

- 1. Mahasiswa S2/S3 yang sedang menjalani tugas akhir.
- 2. Melampirkan KTP.
- 3.Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dengan melampirkan KHS/transkrip nilai terakhir dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- 4.Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00.
- 5.Tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan dana dari lembaga lainnya.
- 6.Bersedia menyelesaikan tugas akhir (Tesis/Disertasi) dalam jangka waktu maksimal 1 tahun untuk tesis dan 3 untuk disertasi.

Persyaratan:

- 1.Melampirkan Proposal Penelitian hasil sidang/seminar proposal dengan tema kajian yang berkaitan pada Tiga Ranah Pancasila.
- 2.Terbukti telah lolos sidang proposal dengan melampirkan surat persetujuan dari penguji sidang dan pembimbing Tesis/Disertasi atau berita acara sidang/seminar proposal.
- 3. Melampirkan surat penelitian dari Universitas.
- 4. Melampirkan rincian rencana anggaran biaya penelitian.
- 5.Melampirkan dan menandatangani surat pernyataan. (format terlampir).
- 6.Melampirkan surat rekomendasi dari supervisor/promotor (format terlampir).
- 7. Menuliskan "surat motivasi" yang menjelaskan tentang:
 - a. Alasan mengikuti program
 - b. Topik penelitian
 - c. Alasan mengapa layak mendapatkan bantuan dana penelitian

III. TATA CARA PENDAFTARAN, JADWAL & ALUR TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM

ALUR SELEKSI

- 1 Administratif
- 2 Substantif
- 3 Wawancara





TATA CARA PENDAFTARAN

https://danadarmapancasila.org

Para pelamar diharapkan untuk memperhatikan betul segala kelengkapan administratif yang diperlukan sebagaimana tercantum pada laman Yayasan Dana Darma Pancasila. Seluruh proses pengiriman dokumen dilakukan secara online melalui unggah dokumen. Jika terdapat masalah pada proses unggah dokumen dapat mengirimkan email tertera.

IV. ALUR PENDAFTARAN BANTUAN DANA PENELITIAN

TAHAPAN ALUR PENDAFTARAN



Pendaftaran

Pendaftaran merupakan tahapan seleksi administrasi melalui laman danadarmapancasila.org.



Seleksi Administrasi

Tahap ini merupakan tahapan seleksi administrasi untuk menilai kelengkapan berkas yang dikirim oleh pelamar pada saat mendaftar.



Seleksi Substansi

Tahap ini merupakan tahapan seleksi yang dilakukan untuk menilai apakah topik penelitian pelamar sesuai dengan paradigma Tiga Ranah Pancasila.



Seleksi Wawancara

Tahap wawancara dilakukan untuk mengelaborasi kajian yang dibahas oleh pendaftar beasiswa serta menilai kelayakan, kesiapan dan kesanggupannya untuk mengikuti program hingga akhir.



Pelatihan Tiga Ranah Pancasila

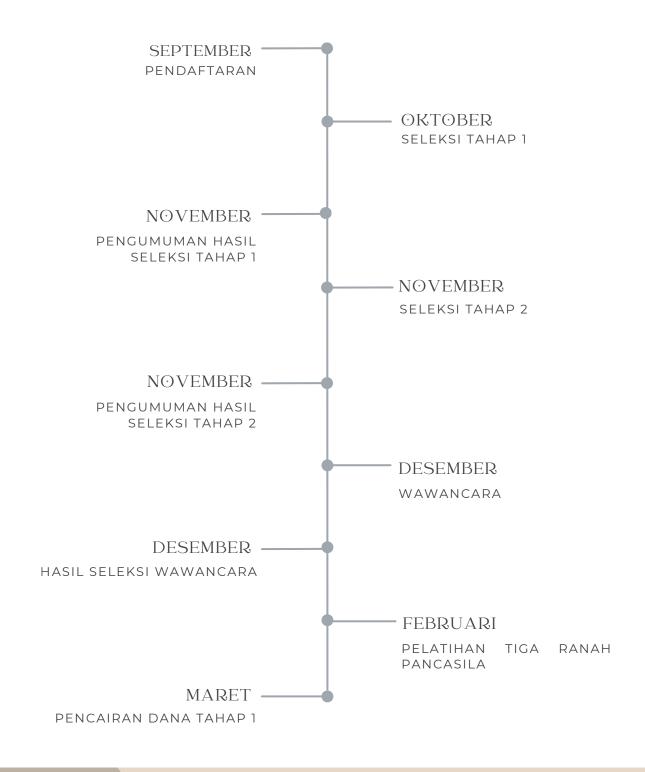
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan materimateri terkait Tiga Ranah Pancasila kepada pendaftar yang telah lulus seleksi wawancara agar memahami secara substantif terkait Tiga Ranah Pancasila yang menjadi inti sari dalam kajiannya.



Pencairan Bantuan Dana Tahap 1

Pada tahap ini dana yang dicairkan sebesar 70%.







Lampiran Surat

01

SURAT PERNYATAAN
(FORMAT TERLAMPIR DI WEBSITE)

SURAT REKOMENDASI (FORMAT TERLAMPIR DI WEBSITE) 02

03

SURAT MOTIVASI (FORMAT BEBAS)

Penutup

Yayasan Dana Darma Pancasila sangat berharap Program bantuan dana penelitian ini dapat semakin memperkaya khasanah penelitian tentang Pancasila di berbagai intitusi perguruan tinggi. Khususnya, dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya kajian-kajian yang memperdalam pemahaman serta realisasi Pancasila di tiga ranah, yaitu ranah Tata Nilai, Tata Kelola, dan Tata Sejahtera.

Buku panduan ini menjelaskan tentang jenis, kriteria dan persyaratan, serta mekanisme pendaftaran program Dana Darma Pancasila secara padat dan rinci.

Harapan kami, buku panduan program ini dapat menjadi pedoman bagi para pihak terkait, terutama para calon pendaftar penerima manfaat dalam proses melakukan pendaftaran program bantuan Dana Penelitian Dana Darma Pancasila.

PODCAST TIGA RANAH PANCASILA

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Tuhan yang Mahakuasa, pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022, bertepatan dengan peringatan ulang tahunnya yang ke-12, Aliansi Kebangsaan, bekerjasama dengan Yayasan Suluh Nuswantara Bakti dan Forum Komunikasi Putra Putri TNI-POLRI, telah meluncurkan program podcast berjudul _Tiga Ranah Pancasila, Saatnya Cendekiawan Bicara. Serial Podcast ini berbicara tentang bagaimana mewujudkan pembangunan nasional berdasarkan paradigma Pancasila melalui tiga ranah sosial, yakni mental-kultural atau tata-nilai, institusional-politikal atau tata-kelola, dan ranah material-teknologikal atau tata-sejahtera.

Ketiga ranah sosial pembangunan tersebut merupakan rangkuman pemikiran para cendekiawan dan kaum cerdik pandai dari berbagai disiplin ilmu dan profesi, dari serial diskusi -"Mewujudkan Kebagsaan yang Berperadaban dengan Paradigma Pancasila", yang diselenggarakan Aliansi Kebangsaan bersama Forum Rektor Indonesia dan sejumlah mitra strategis lainnya selama dua setengah tahun, sejak Maret 2019.

Ranah mental-kultural atau tata-nilai, berbicara tentang bagaimana memajukan kebudayaan dan peradaban bangsa, dengan membangun manusia Indonesia yang inklusif dalam segala aspek kehidupannya.

Ranah institusional-politikal atau tata-kelola, berbicara tentang bagaimana penataan sistem demokrasi, hukum, dan politik, dalam kerangka persatuan nasional untuk menjadikan Indonesia bangsa yang berdaulat.

Ranah material-teknologikal atau tata-sejahtera, tentang bagaimana penguasaan pengembangan inovasi teknologi berbasis potensi Indonesia, dalam rangka kesejahteraan dan kemandirian bangsa.

Saksikan di YouTube Podcast Tiga Ranah Pancasila.

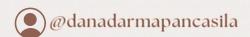








Media Sosial



Podcast Yayasan Dana Darma Pancasila

danadarmapancasila.org





Buku Panduan

Dana Darma Pancasila

"Perjalananmu dimulai dari karya"

HUBUNGI KAMI

Irma Khairani
WA +6281389047660
kontak@danadarmapancasila@org

Desain by NFA Copyright, Created with Canva.